



LAPORAN KINERJA (LKj) 2024

DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Dewi Sartika No. 45 Kota Palu, Sulawesi Tengah 94121

Email : sulteng.pariwisata@gmail.com

Website : pariwisata.sultengprov.go.id





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH 2024

Disusun oleh :
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Dewi Sartika No.45 Palu 94121
Telp. 0451 483942 Fax. 483941
Email : sulteng.pariwisata@gmail.com
Website : pariwisata.sultengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun. Laporan ini pada khususnya menggambarkan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Dari hasil Evaluasi Kinerja, diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada 2024 dengan dukungan dana APBD **sebesar Rp. 21.403.749.266,-**
Dari anggaran yang tersedia tersebut dapat direalisasikan sebesar **Rp. 19.416.163.402,-** atau sebesar **90,71 %**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam upaya pengoptimalisasian kinerja sehingga sangat diperlukan koreksi / perbaikan dan penyempurnaan secara optimal dan menyeluruh pada kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepada pihak-pihak terutama kepada seluruh pejabat dan staf Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bekerjasama dalam pencapaian program kegiatan yang dilakukan tahun 2024, kami tak lupa menyampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian didalam meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme dibidang tugas masing-masing.

Palu, 31 Januari 2025



**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
SISTIMATIKA PENULISAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Cascading Kinerja	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
1.3. Isu-Isu Strategis	12
1.4. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana	13
1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 ...	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	16
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	16
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	18
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan 2024.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja	26
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	26
b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024.....	27
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Pariwisata	30
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	31
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.....	31
f. Analisis efisiensi sumber daya dan realisasi anggaran.....	33
g. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	34
3.2. Realisasi Anggaran	40
BAB IV P E N U T U P	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja	42
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	

SISTIMATIKA PENULISAN

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas keadaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024.

Bab II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan Visi dan Misi serta muatan rencana strategis/kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024.

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 merupakan presentasi hasil pelaksanaan tugas selama 1 (tahun) yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menyajikan seluruh capaian kinerja dari semua sasaran dan kegiatan selama tahun 2024. Penilaian capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan target atau rencana kerja dengan realisasinya dari indikator kinerja input, output dan outcomes.

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, yang sangat ditekankan adalah kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan program pembangunan berbasis kinerja yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, realisasi capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu : Rasio PDRB Pariwisata dengan capaian 69,23 % Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dengan capaian 161,8 % dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif dengan capaian 74,26 % sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di kategorikan tinggi.

Capaian Kinerja selama tahun 2024 adalah wujud dari keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan Pariwisata. Program yang telah dicapai di tahun 2024 ini adalah (1). Peningkatan Daya Tarik Wisata, (2). Pemasaran Pariwisata, (3). Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, (4). Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, (5). Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Harapan kami dengan selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah Sulawesi Tengah, khususnya dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada masa kini dan masa akan datang.

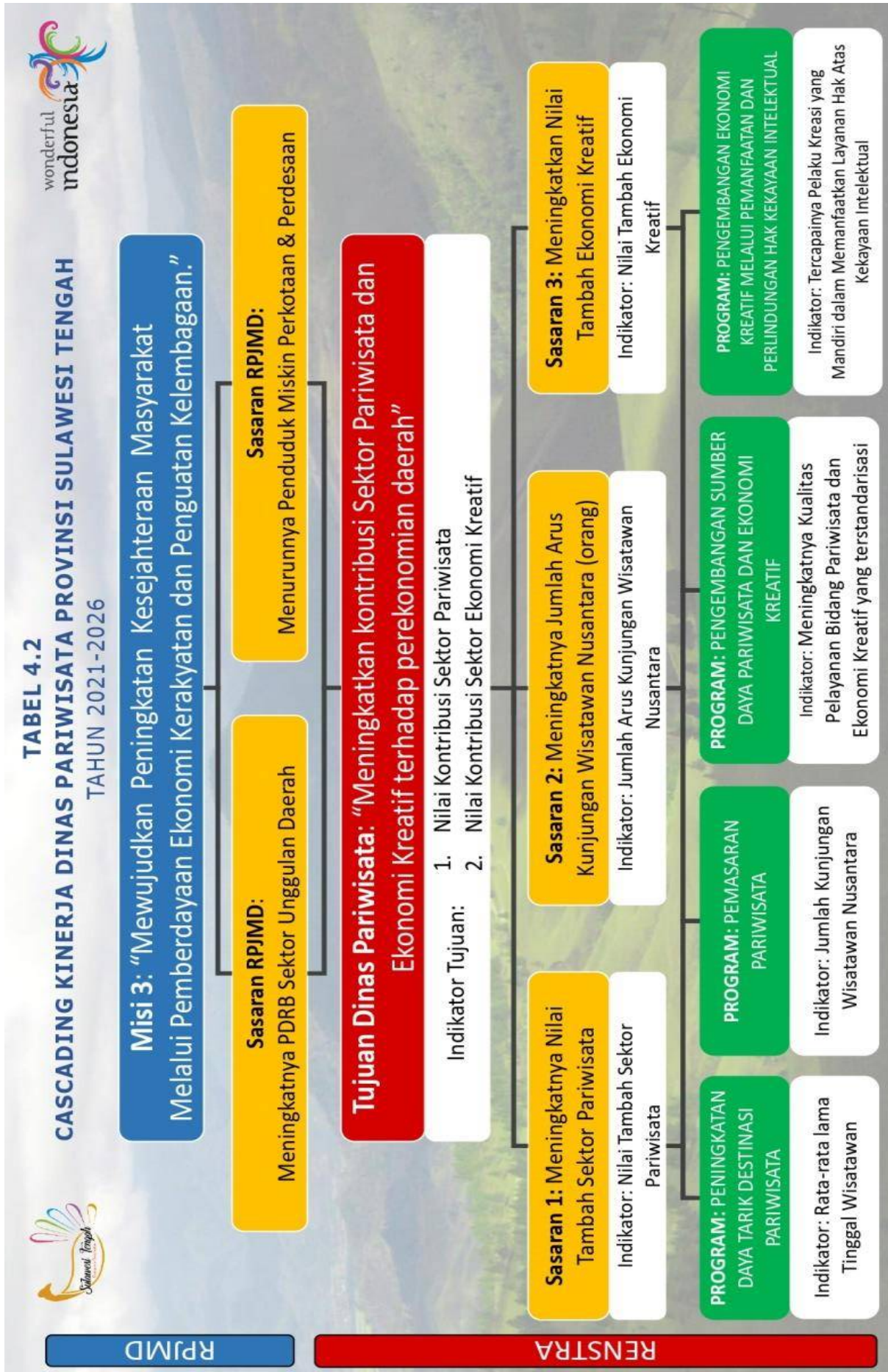
Palu, 31 Januari 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

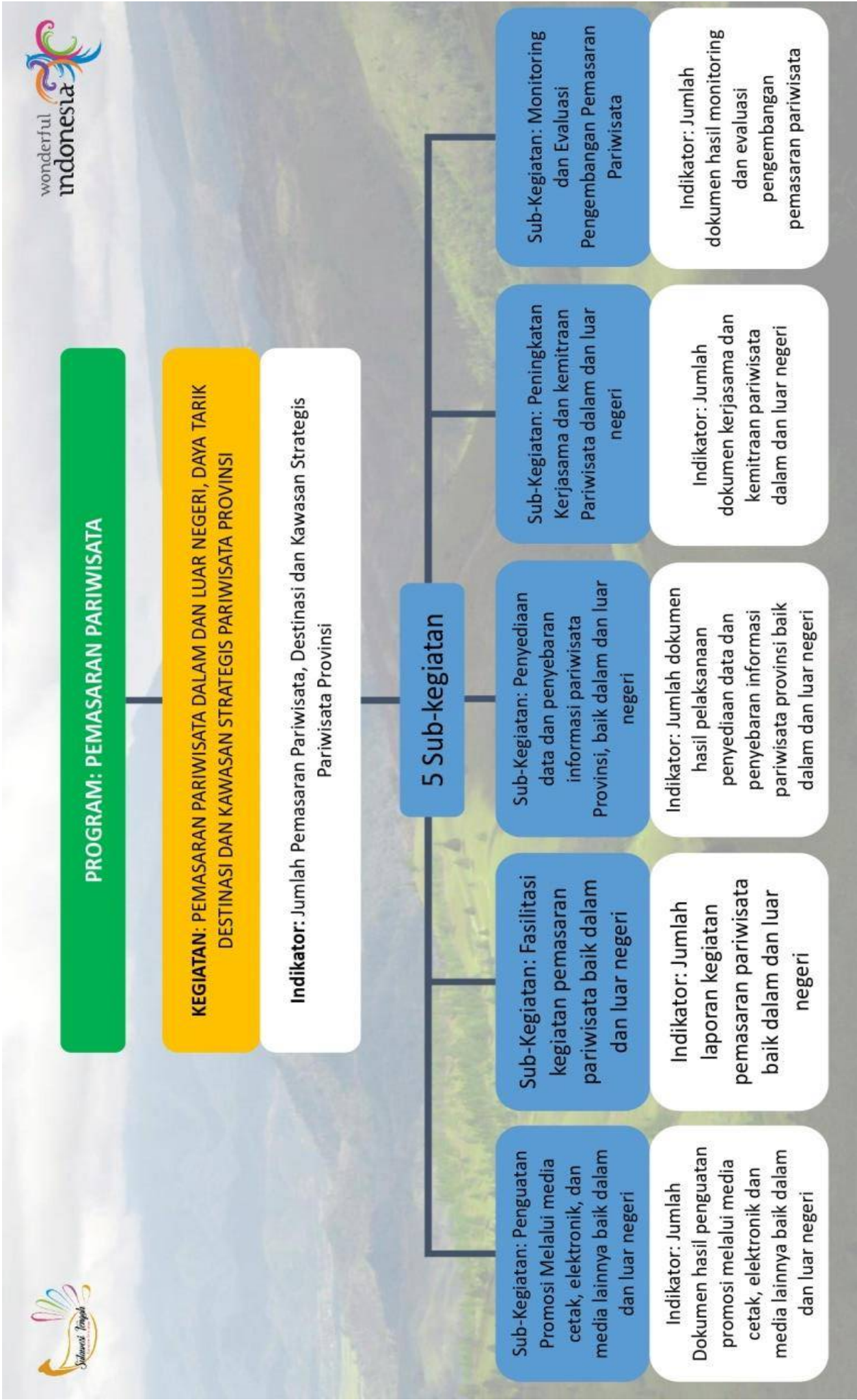
Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

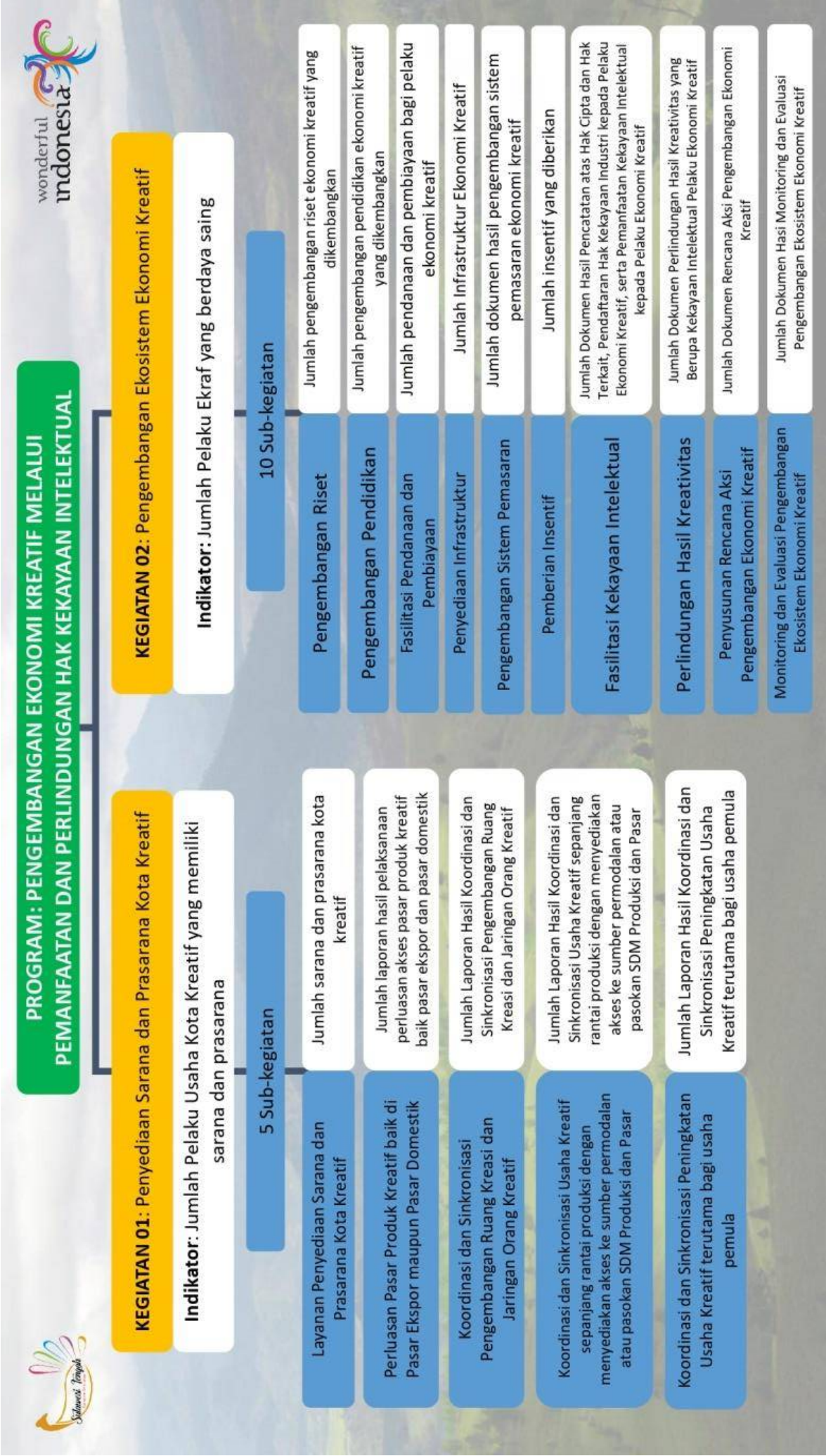
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja









1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; .
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

- **Kepala Dinas**

- **Sekretaris**

1. Sub Bagian Keuangan dan Asset
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

- Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- UPT.Dinas

2. Tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang

1. SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas dikepalai oleh seorang pejabat Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
3. Penyiapan bahan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum.
4. Pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga, Korpri dan umum.
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Bidang Pengembangan Destinasi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya tarik dan Pengembangan Kawasan Pariwisata. Untuk

menyelenggarakan tugasnya, kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata.
2. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan Destinasi pariwisata, melaksanakan kajian/penelitian pengembangan Destinasi pariwisata dan penerbitan perizinan berusaha berbasis pariwisata.
4. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan kawasan pariwisata, koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kawasan pariwisata, melaksanakan kegiatan teknis pengembangan kawasan pariwisata meliputi pembinaan dan penataan kawasan pariwisata unggulan dan prioritas Provinsi.
5. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan pengembangan sadar wisata dan kerja sama antar lembaga dan masyarakat serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri, melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan teknis peningkatan pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata dalam upaya pengembangan destinasi dan kawasan wisata.
6. Penyiapan bahan kerja sama bagi pengembangan Destinasi pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.
7. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan Destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata peningkatan daya tarik wisata.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata.

3. BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Bidang Pemasaran Pariwisata dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
2. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang penguatan promosi, penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan Penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
5. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Penguatan promosi, Penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
6. Pelaksanaan penyelenggaraan penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan berdasarkan program dan kebijakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata.
7. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

9. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

4. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan Bidang Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
2. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan Ekonomi Kreatif.
6. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif.
7. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya sektor ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak Kekayaan Intelektual.
8. Penyiapan bahan dan data untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

9. Penyiapan bahan rumusan dan kebijakan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kota kreatif, ruang kreatif, dan jaringan orang kreatif.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
11. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

5. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
6. Pemberian bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan supervisi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

8. Melaksanakan program pelatihan dan skema uji kompetensi di bidang pengembangan standar kompetensi dan kerangka kualifikasi bidang Pariwisata.
9. Memfasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi bidang Pariwisata, pembentukan Badan Promosi Daerah dan kerjasama antar lembaga Pariwisata dan lembaga lainnya dalam program penguatan Sumber Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Pengembangan standar dan peningkatan Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif.
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
12. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1.3. Isu - Isu Strategis

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada dan telaahan visi dan misi pembangunan pariwisata, sasaran jangka menengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan OPD Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek implikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal-hal penting yang akan menjadi agenda Prioritas dalam Pembangunan Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah.

Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam peruntukan pariwisata yang belum optimal.
2. Pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata untuk pembentukan kawasan strategis pariwisata provinsi.
3. Perlunya penyusunan berbagai penelitian dan kajian tentang potensi pariwisata daerah.
4. Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan.
5. Perlunya koordinasi terpadu lintas sektoral untuk Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan dapat merumuskan rencana aksi dan tindak lanjut untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah.

- Pengembangan Daya Saing Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.
- Pentingnya mendorong para pelaku Ekraf untuk dapat memanfaatkan layanan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kerja pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Pembuatan paket wisata dan peningkatan promosi pemasaran pariwisata yang berbasis digital.
- Peningkatan kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata, baik antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku industri pariwisata di sektor swasta.
- Koordinasi dan sinkronisasi data-data kepariwisataan antar bidang maupun lintas sektoral.

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana

1.4.a Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam Penyelenggaraan TUPOKSI Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan kondisi kepegawaian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Serta Susunan Personil Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Golongan Per 31 Desember 2024

PEGAWAI	JUMLAH
Golongan IV	10 Orang
Golongan III	39 Orang
Golongan II	2 Orang
Jumlah	51 Orang

**Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
Sesuai Jabatan Per 31 Desember 2024**

Pegawai	Jumlah
Eselon II	1 Orang
Eselon III	4 Orang
Eselon IV	2 Orang
Fungsional	8 Orang
Pelaksana	36 Orang
Jumlah	51 Orang

**Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	16 Orang
S1	27 Orang
Sarjana Muda/D3	2 Orang
S L T A	6 Orang
Jumlah	51 Orang

1.4.b. Aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka ketersediaan Sumber Daya Manusia (*human resources*), sarana dan prasarana penunjang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Adapun nilai asset tetap berupa sarana dan prasarana bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Neraca Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tanah	Rp. 11.379.180.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 6.137.316.647,-
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 37.327.250.605,06
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 2.322.350.111,10
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 229.650.000,-
6.	Aset Lainnya	Rp. 5.108.547.750,-
	Total	Rp. 62.504.295.113,16

1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan nilai capaian sebesar **84,60 dengan predikat A**, yang membuahkan penghargaan sebagai salah satu OPD yang berhasil mendapat **Nilai SAKIP A** dan mendapat reward atas hasil penilaian dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian tersebut termasuk dalam kategori **Memuaskan** yang memberikan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahanberorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan samapai ke level eselon IV/Pengawas/Sub Koordinator dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,20
2. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,00
3. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,90
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 22,50

Dari hasil evaluasi tersebut, masih terdapat permasalahan yang harus ditindak lanjuti dengan melakukan beberapa perbaikan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No.	Hasil Evaluasi AKIP	Tindak Lanjut
1.	Membuat diagram Crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;	Akan membuat diagram Crosscutting Tahun 2024, sebagai acuan informasi konektivitas hubungan kinerja, kebijakan dan aktivitas tugas dan fungsi;
2.	Mendorong adanya kebijakan reward dan punishment atas Pengukuran Kinerja;	Kebijakan pemberian reward ataupun punishment selama ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
3.	Agar lebih menggiatkan Sosialisasi kepada seluruh Pegawai atas hasil Pengukuran Kinerja termasuk Sosialisasi tentang Indikator Kinerja Individu (IKI) dan target kinerja ke semua Pegawai.	Telah dilaksanakan Sosialisasi tentang tata cara pembuatan dan pengisian Indikator Kinerja Individu dan target kinerja kepada seluruh Pegawai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan strategis Dinas Pariwisata adalah Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah. Tujuan ini menunjukkan suatu kondisi yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang akan mengarahkan perumusan sasaran, program serta kegiatan dalam rangka merealisasikan **Misi 3 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.**

Sedangkan **Sasaran Strategis meliputi meningkatnya Rasio PDRB Pariwisata, meningkatnya Jumlah Perjalanan Wisatawan dan meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif.** Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran di rumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapaian sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk di wujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Adapun yang menjadi **Indikator Kinerja Dinas Pariwisata adalah Rasio PDRB Pariwisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif.** Indikator Kinerja mempunyai tujuan dan sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan (*suistenable*) dan memiliki ukuran secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan kepariwisataan adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Swasta dan seluruh Masyarakat. Keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh adanya kerjasama dan keterpaduan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga harus dilakukan secara terintegrasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata Sulawesi Tengah diperlukan langkah-langkah strategis dan arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah Sulawesi Tengah sesuai uraian dibawah ini.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Meningkatkan kapasitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata 3. Meningkatkan pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 4. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata 5. Meningkatkan pengembangan usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota
Meningkatkan Pemasaran Pariwisata	1. Mengembangkan dan memperluas jaringan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri 2. Mempromosikan potensi Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.Meningkatkan kapasitas sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Meningkatkan pelatihan dan pendampingan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	1.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif 2. Meningkatkan pembinaan usaha ekonomi kreatif

2.3. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

NO.	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1.	Meningkatnya Rasio PDRB Pariwisata	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 2.611.633.676	Rp 3.835.347.101	Rp 1.223.713.425
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp 136.150.363	Rp 297.178.750	Rp 161.028.387
		Perencanaan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rp 136.150.363	Rp 297.178.750	Rp 161.028.387
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 2.121.374.222	Rp 1.256.999.221	-Rp 864.375.001
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 1.205.501.300	Rp 321.433.299	-Rp 884.068.001
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 915.872.922	Rp 935.565.922	Rp 19.693.000
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nuantara (orang)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 354.109.091	Rp 2.281.169.130	Rp 1.927.060.039
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 49.000.000	Rp 1.219.138.939	Rp 1.170.138.939
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 79.137.000	Rp 86.265.102	Rp 7.128.102
		Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 225.972.091	Rp 975.765.088,80	Rp 749.792.998
		PEMASARAN PARIWISATA	Rp 1.358.846.800	Rp 2.357.641.800	Rp 998.795.000
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 1.358.846.800	Rp 2.357.641.800	Rp 998.795.000
		Penguatan Promosi Melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Rp 260.000.000	Rp 398.397.000	Rp 138.397.000
		Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Rp 1.098.846.800	Rp 1.959.244.800	Rp 860.398.000

NO.	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
3.	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp 1.070.780.000	Rp 1.466.251.160	Rp 395.471.160
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp 778.887.972	Rp 1.145.014.132	Rp 366.126.160
		Perluasan Pasar Produk Kreatif baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Rp 710.777.332	Rp 1.073.833.492	Rp 363.056.160
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Rp 15.510.640	Rp 15.510.640	Rp -
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula	Rp 52.600.000	Rp 55.670.000	Rp 3.070.000
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp 291.892.028	Rp 321.237.028	Rp 29.345.000
		Perlindungan Hasil Kreatifitas	Rp 117.044.501	Rp 117.044.501	Rp -
		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Rp 174.847.527	Rp 204.192.527	Rp 29.345.000
		J U M L A H	Rp 5.041.260.476	Rp 7.659.240.061	Rp 2.617.979.585

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Pencapaian Sasaran Tahun 2024

NO.	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 700.000.000	Rp 901.000.000	Rp 237.678.334
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp 403.608.365	Rp 641.286.699	Rp 237.678.334
	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	Rp 219.314.915	Rp 464.860.584	Rp 245.545.669
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Rp 184.293.450	Rp 176.426.115	-Rp 7.867.335
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp 296.391.635	Rp 259.713.301	-Rp 36.678.334
2	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Rp 89.075.545	Rp 89.075.545	Rp -
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Rp 207.316.090	Rp 170.637.756	-Rp 36.678.334
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 12.240.851.040	Rp 12.843.509.206	Rp 602.658.166
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 286.275.950	Rp 656.861.950	Rp 370.586.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 286.275.950	Rp 656.861.950	Rp 370.586.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.237.351.516	Rp 7.891.375.268	-Rp 345.976.248
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.047.111.516	Rp 7.588.755.268	-Rp 458.356.248
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 132.240.000	Rp 135.120.000	Rp 2.880.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 58.000.000	Rp 167.500.000	Rp 109.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 112.297.260	Rp 269.808.260	Rp 157.511.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 112.297.260	Rp 269.808.260	Rp 157.511.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 7.900.000	Rp 112.855.000	Rp 104.955.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 7.900.000	Rp 112.855.000	Rp 104.955.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 408.529.345	Rp 661.048.050	Rp 252.518.705
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.932.647	Rp 14.440.065	Rp 7.507.418
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 73.597.500	Rp 86.541.900	Rp 12.944.400
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 30.498.217	Rp 57.674.604	Rp 27.176.387
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 297.500.981	Rp 502.391.481	Rp 204.890.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 701.591.000	Rp 792.236.600	Rp 90.645.600
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 701.591.000	Rp 792.236.600	Rp 90.645.600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.205.401.769	Rp 2.113.339.877	-Rp 92.061.892
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 255.125.989	Rp 281.570.989	Rp 26.445.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.950.275.780	Rp 1.831.768.888	-Rp 118.506.892
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 281.504.200	Rp 345.984.200	Rp 64.480.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 249.964.200	Rp 246.464.200	-Rp 3.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 26.540.000	Rp 22.520.000	-Rp 4.020.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.000.000	Rp 77.000.000	Rp 72.000.000
	J U M L A H	Rp 12.940.851.040	Rp 13.744.509.206	Rp 840.336.500

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Rasio PDRB Pariwisata	Rasio PDRB Pariwisata	$\frac{\text{PDRB Pariwisata}}{\text{PDRB Total}} \times 100 \%$	Kajian Capaian Kinerja Indikator Utama Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Bidang Pariwisata Tahun 2024	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Meningkatnya Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	- Jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun n	Kajian Capaian Kinerja Indikator Utama Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Bidang Pariwisata Tahun 2024	Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	$\text{Outputkt} = \frac{\text{Produksikt}}{\text{NTB}} \times \text{Hargakt}$ $\text{NTB} = \sum (\text{output-konsumsi antara})$	Kajian Capaian Kinerja Indikator Utama Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Bidang Pariwisata Tahun 2024	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 3 indikator program kegiatan teknis pada 4 bidang pengampu dan 1 indikator program kegiatan non teknis yang diampu oleh Sekretariat, sebagaimana penjelasan berikut:

1. **Indikator Rasio PDRB Pariwisata**, capaiannya dihitung dari PDRB Pariwisata dibagi Total PDRB dikalikan 100 %. Jumlah biaya yang dibelanjakan oleh wisatawan diperoleh dari nilai transaksi yang dilakukan pada 13 sub sektor usaha pariwisata antara lain Jasa Transportasi Wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makanan dan Minuman, Penyediaan Akomodasi, Wisata Tirta, Spa, dst. Indikator ini diampu oleh Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai bidang utama pencapaian sasaran kinerja dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bidang pendukung pencapaian sasaran kinerja.
2. **Indikator Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara**, capaiannya dihitung dari akumulasi jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2024 yang dihimpun berdasarkan data dari Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, rekapitulasi kunjungan event Dinas Pariwisata dan data BPS. Indikator ini diampu oleh Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
3. **Indikator Nilai Tambah Ekonomi Kreatif**, capaiannya dihitung dari akumulasi nilai transaksi pada Kabupaten / Kota yang dibukukan dari 17 sub sektor Ekonomi Kreatif antara lain Fashion, Kriya, Fotografi, Kuliner, Periklanan, Desain Produk, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, dst. Indikator ini diampu oleh Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai bidang utama pencapaian sasaran kinerja dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bidang pendukung pencapaian sasaran kinerja.
4. **Indikator Indeks Reformasi Birokrasi**, capaiannya diperoleh dari hasil evaluasi penilaian kinerja oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari beberapa komponen penilaian yaitu Komponen Pengungkit bernilai 60 yang diperoleh dari Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform serta dari komponen Hasil Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. seperti yang dapat dilihat pada lampiran berikut:



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. NOVALINA, MM**

Jabatan : **Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

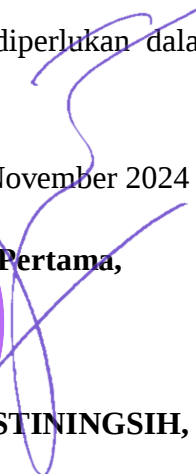
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

Pihak Kedua,

Dra. NOVALINA, MM

Pihak Pertama,

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekraf Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	1. Rasio PDRB Pariwisata 2. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 3. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	0,46 % 5.500.000 Orang Rp 150 Miliar

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 12.843.509.205,61	APBD
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 3.835.347.101,39	APBD
3	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 2.357.641.800,00	APBD
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 1.466.251.160,00	APBD
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 901.000.000,00	APBD

Palu, 11 November 2024

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

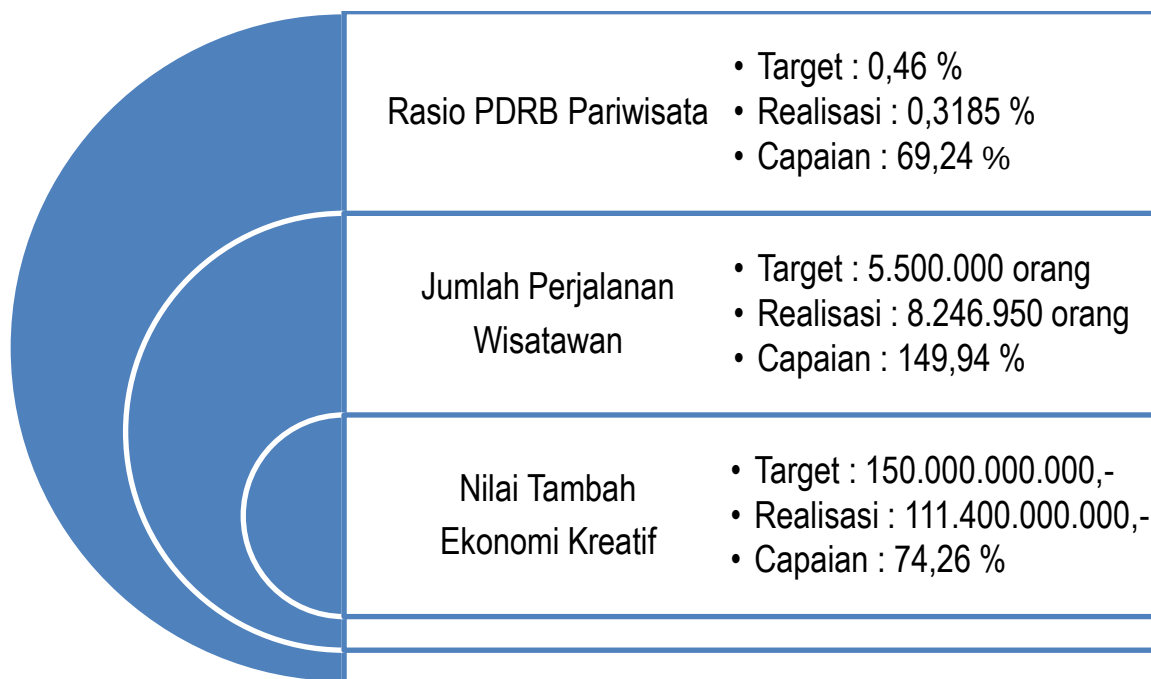
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2024

3.1 A. Capaian Kinerja

Secara umum, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam memenuhi tugas dan fungsi yang harus diwujudkan di tahun 2024 maka ditetapkan dalam 3 sasaran dan 3 indikator. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran. Langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi untuk masing-masing komponen sasaran sehingga diperoleh capaian tiap komponen dengan rata-rata seluruh sasaran. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal dan internal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.A Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024



Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa pada persentase tingkat capaian indikator Rasio PDRB Pariwisata sebesar 69,24 % dikategorikan Sedang. Kemudian pada indikator Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara dengan capaian sebesar 149,94 % dikategorikan Sangat Tinggi. Selanjutnya pada indikator Nilai Tambah Ekonomi Kreatif capaiannya sebesar 74,26 % dikategorikan Sedang.

Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk masing-masing sasaran tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai tugas

pokok dan fungsi kerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 3 indikator yaitu **Nilai Tambah Sektor Pariwisata, Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif**. Untuk Indikator Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif adalah indikator yang baru mulai dilaksanakan pada Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2021-2026.

Realisasi capaian kinerja pada indikator Nilai Tambah Sektor Pariwisata pada tahun 2022 adalah sebesar 0,02 %. Kemudian pada tahun 2023, satuan indikatornya dirubah dari persentase menjadi nilai rupiah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Adapun realisasi capaian kinerja Nilai Tambah Sektor Pariwisata Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.228.210.200.000,-

Pada **tahun 2024** indikator kinerja **Nilai Tambah Sektor Pariwisata** berubah menjadi **Rasio PDRB Pariwisata yang satuan indikatornya adalah persentase (%)** sesuai hasil pembahasan Desk Rakortekrenbang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan sasaran target kinerja sebesar 0,46% yang realisasi capaiannya adalah **sebesar 0,3185 %**.

Pada indikator **Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara** perkembangannya dapat dilihat pada tingkat kunjungan wisatawan nusantara ke Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang cukup fluktuatif. Di tahun 2020 sektor pariwisata mengalami dampak penurunan yang sangat signifikan akibat merebak dan menyebarnya pandemi virus corona (covid 19) yang melanda dunia. Kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 1.812.995 orang atau sebesar 47,7 jauh mengalami penyusutan dan ini terjadi secara global, di seluruh dunia. Mobilitas masyarakat yang terbatas dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di dalam negeri serta penutupan berbagai tempat rekreasi dan wisata sebagai bentuk antisipasi penyebaran pandemi, berimbas besar

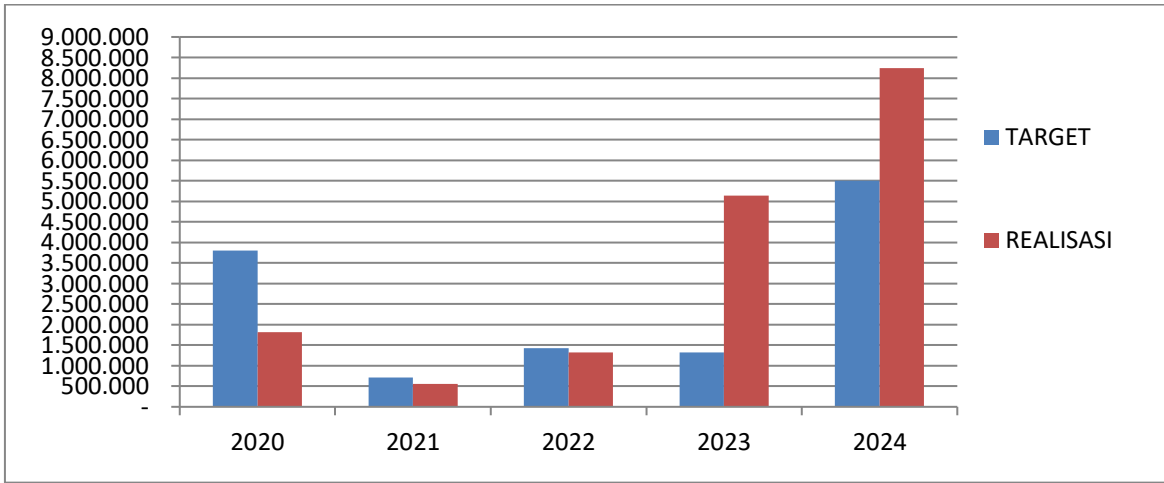
terhadap perputaran roda ekonomi, termasuk juga pada pengurangan tenaga kerja di sektor pariwisata. Keadaan ini masih tetap berlanjut hingga ke Tahun 2021, dimana jumlah kunjungan wisatawan Nusantara mencapai jumlah 555.235 atau sebesar 77,8%.

Selanjutnya di tahun 2022, kunjungan wisatawan Nusantara semakin mengalami peningkatan, sebagai dampak dari adanya kebijakan Pemerintah yang memberi keleluasaan untuk melakukan perjalanan wisata tetapi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat diantaranya dengan persyaratan wajib vaksin covid-19 sebanyak 3 tahap dan menerapkan protocol CHSE yakni Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan) dan Environment Sustainability (kelestarian lingkungan), sehingga dapat mencapai jumlah kunjungan sebanyak 1.317.958 atau sebesar 92,34% sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk Tahun 2023, capaian jumlah kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 5.139.979 orang atau meningkat sebesar 290 % sangat jauh melampaui capaian tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara ini selain disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah tentang pemberlakuan perjalanan wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan persyaratan wajib vaksin covid-19 sebanyak 3 tahap, juga karena diperkuat lagi dengan adanya himbauan dari Pemerintah yang memotivasi masyarakat agar mau berwisata di dalam negeri saja, salah satunya melalui publikasi di media sosial dengan hastag #ayoberwisata dan #diindonesiaaja. Sedangkan untuk **tahun 2024** capaian jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara adalah **sebanyak 8.246.950 orang** atau meningkat sebesar **149,94 %** dari tahun sebelumnya. Hal ini membuat pariwisata Indonesia dapat bangkit kembali yang tentunya turut berdampak pada sektor ekonomi kreatif, berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat yang diperoleh dari kunjungan wisatawan Nusantara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2020 – 2024**

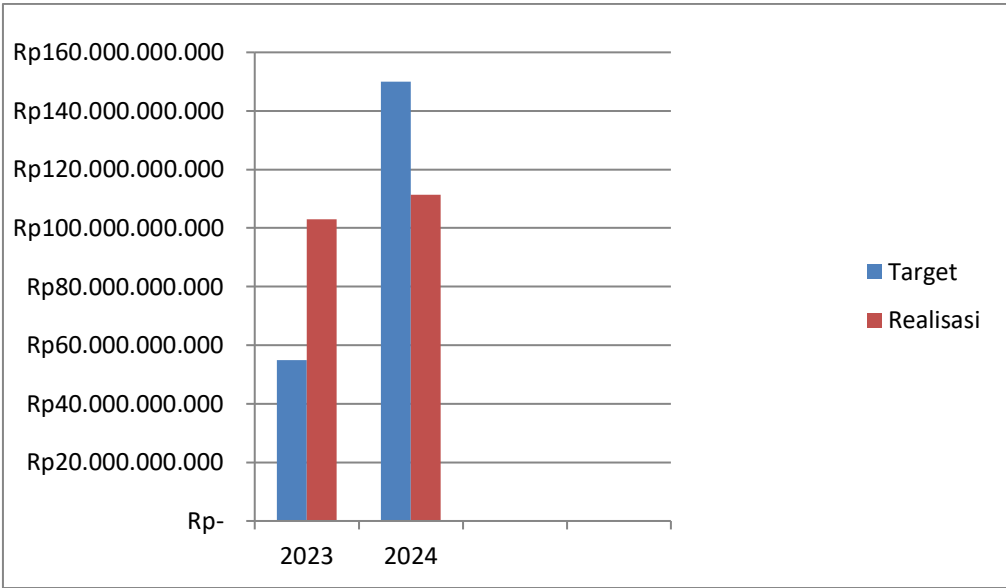
NO.	TAHUN	WISATAWAN NUSANTARA (WISNUS)		CAPAIAN (%)
		TARGET (Org)	REALISASI (Org)	
1	2020	3.800.000	1.812.995	47,7 %
2	2021	713.618	555.235	77,8 %
3	2022	1.427.237	1.317.958	92,34 %
4	2023	1.323.098	5.139.979	388,48 %
5	2024	5.500.000	8.246.950	149,94 %



Kemudian sama halnya seperti indikator Nilai Tambah Sektor Pariwisata yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk indikator **Nilai Tambah Ekonomi Kreatif** adalah indikator yang baru mulai dilaksanakan pada Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2021-2026.

Realisasi capaian kinerja pada indikator Nilai Tambah Ekonomi Kreatif pada tahun 2022 adalah sebesar 0,05 %. Kemudian pada tahun 2023, satuan indikatornya dirubah dari persentase menjadi nilai rupiah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Adapun realisasi capaian kinerja Nilai Tambah Sektor Pariwisata Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 103.981.200.000,- Sedangkan untuk **tahun 2024** nilai capaiannya adalah **sebesar Rp.111.400.000.000,-** atau **74,26%** dari target yang ditentukan. Untuk lebih jelasnya dapat diihat pada grafik berikut ini:

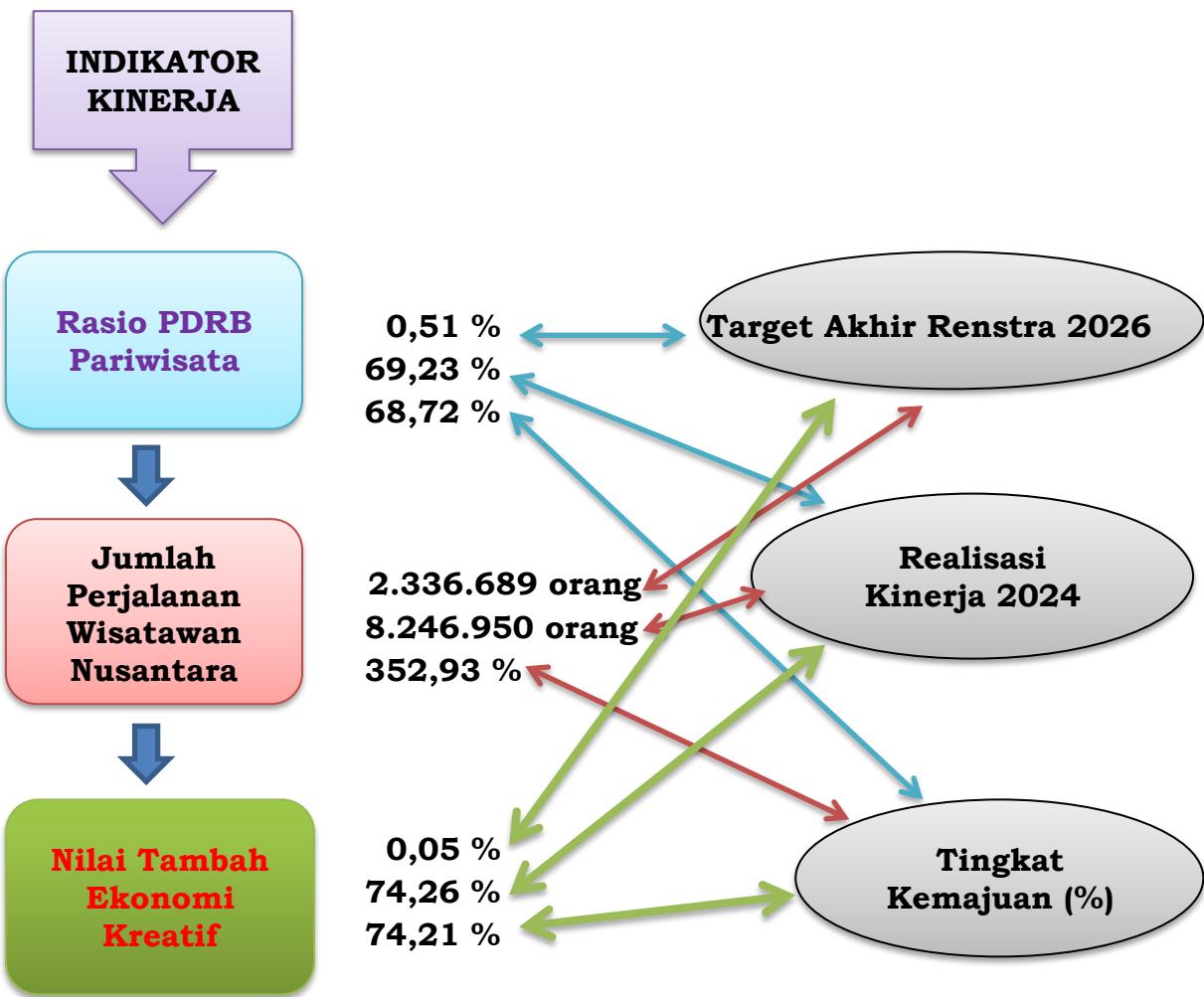
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Tahun 2023 – 2024



C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target
RENSTRA

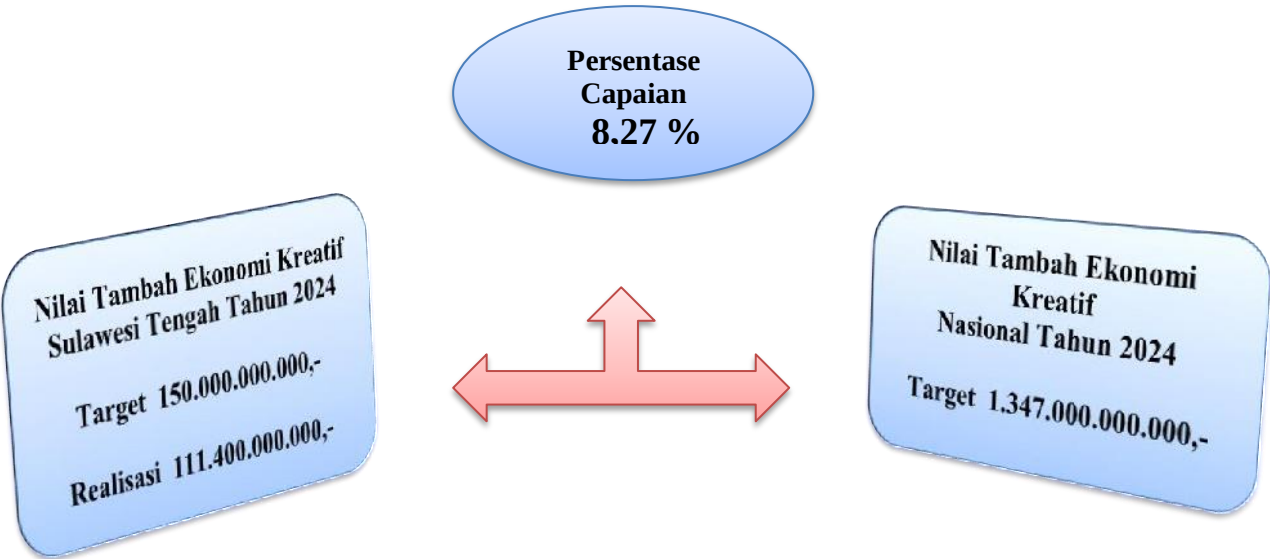
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pariwisata dengan Target Renstra dapat dilihat sebagai berikut :

3.1.C Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan
Target Akhir Renstra Tahun 2026



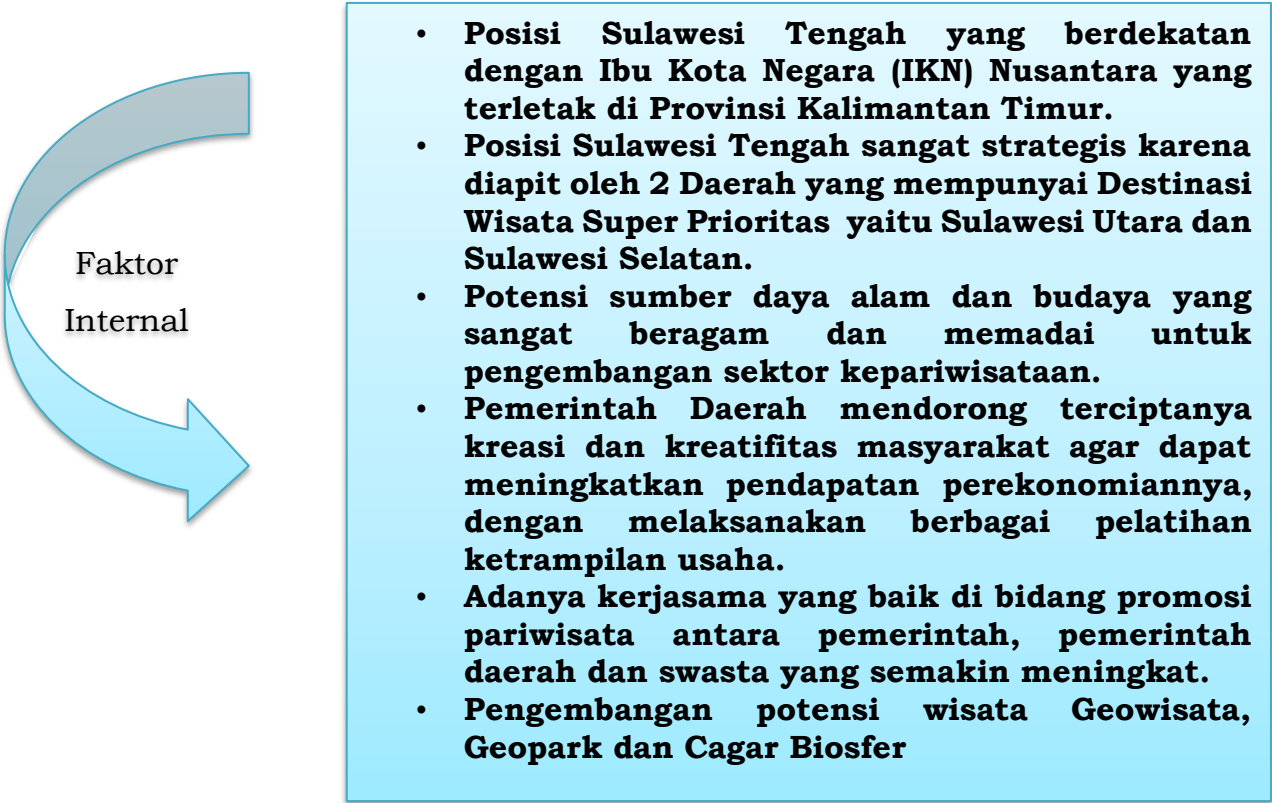
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

Pada **Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026** dan **Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024**, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang sama yaitu Indikator Kinerja **Nilai Tambah Ekonomi Kreatif**, sehingga capaian kinerjanya dapat dibuat perbandingan sebagaimana dapat dilihat dibawah ini:



E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2024 inibaik. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja yang secara umum terkategori tinggi. **Keberhasilan** ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal, sebagaimana tergambar dibawah ini.



- Adanya komitmen pemerintah menjadikan Sektor Pariwisata sebagai salah satu sumber utama devisa negara.
- Kondisi keamanan daerah Sulawesi Tengah semakin kondusif dan terbukanya peluang berinvestasi di sektor pariwisata.
- Meningkatnya kembali minat masyarakat internasional untuk mengadakan perjalanan wisata, setelah pandemic covid-19 mereda.
- Adanya objek wisata unggulan yang memiliki daya tarik dan keunikan serta banyaknya bermunculan destinasi wisata baru.
- Meningkatnya minat masyarakat melewati weekend ataupun long weekend untuk staycation di hotel, penginapan maupun di destinasi wisata.
- Kondisi pemerintahan yang semakin stabil, sehingga memberikan peluang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan.



Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun **penyebab kegagalan dan alternatif solusi** yang telah dilakukan antara lain :



1. Penyediaan sarana dan prasarana di obyek wisata yang belum maksimal dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata.
2. Promosi dan pemasaran produk pariwisata belum terlaksana secara optimal dan terpadu di antara pihak yang terkait.
3. Belum optimalnya dukungan bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan dan pemasaran usaha juga minimnya ketersediaan data pelaku usaha ekraf.
4. Peningkatan kompetensi SDM profesional bidang pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang belum optimal.

1. Pembangunan prasarana di obyek wisata kawasan Megalit Desa Bewa Kab.Poso yaitu pembuatan Toilet dan glamping, juga pembuatan drainase di lokasi FDP Tentena. Kemudian ada pula bantuan pengadaan perlengkapan perahu wisata berupa mesin tempel di Kab. Tojo Una-Una, perlengkapan glamping Desa Bewa Kab.Poso, perlengkapan Homestay di Kab.Sigi dan pengadaan Jetski di Kab. Poso.
2. Untuk mendukung perluasan promosi dan pemasaran produk pariwisata pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan atraksi kesenian dan kebudayaan Taduako Mporego di Samarinda Kalimantan Timur, Pemilihan Duta Wisata Indonesia Tahun 2024. Selain itu juga mengikuti kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain pada kegiatan Bali Beyond Travel Fair (BBTF), International Tourism Investment Forum (ITIF) di Jakarta, Deep and Extreme Indonesia (DXI) di Jakarta, International Creative Industry Conference and Festival (IC Fest) di Yogyakarta, Gelar Wisata Budaya di Batam, Centrestage Asia's Spotlight di Hongkong, Arabian Travel Mart (ATM) Dubai. Juga memberikan dukungan untuk beberapa event pariwisata di Kabupaten/Kota antara lain Festival Melabot Tumbe, Festival Teluk Lalong dan Festival Danau Lindu.
3. Di tahun 2024 telah dilaksanakan pemberian bantuan berupa alat kesenian dan budaya untuk beberapa sanggar seni di Kab. Parigi Moutong, promosi usaha melalui Lomba Kuliner Pembuatan Kue dari Gula Aren di Kab. Tolitoli dan Festival Kuliner Seafood di Kab. Tojo Una-Una, juga fasilitasi pendaftaran Merk Usaha pada Kemenkumham yang dilaksanakan di Kab. Poso. Selain itu telah dilaksanakan pengambilan data pelaku usaha ekraf di 6 Kabupaten.
4. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di beberapa Kabupaten/Kota antara lain : Pelatihan dan Sertifikasi Barista, Pelatihan Fotografi, Pelatihan Peningkatan SDM Pengelolaan Homestay/Penginapan dan Pelatihan Pemandu Wisata.

Alternatif Solusi

F. Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Rasio PDRB Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.835.347.101	3.783.472.892	51.874.209	98,64	1,36
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.357.641.800	2.341.797.944	15.843.856	99,32	0,68
3.	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekraf melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.466.251.160	1.441.883.723	24.367.437	98,34	1,66
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	901.000.000	892.800.801	8.199.199	99,09	0,91

G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 5 program dan 16 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

3.1.G. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (%)
1.	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama Tinggal Wisatawan	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari		3.835.347.100		3.783.472.892		18
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Meningkatkan Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Terstandar Pengelolaannya	Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Terstandar Pengelolaannya	DTW		297.178.750		295.398.750		1,38
	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata	Dokumen	1	297.178.750	1	295.398.750	1	1,38
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah DTW di KSPP yang terstandar pengelolaannya	Jumlah DTW di KSPP yang terstandar pengelolaannya	DTW		1.256.999.221		1.238.971.300		6
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	321.433.299	1	320.519.300	1	1,50
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	4	935.565.922	4	918.452.000	4	4
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Destinasi Pariwisata Provinsi yang terstandar pengelolaannya	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang terstandar pengelolaannya	DPP		2.281.169.129		2.249.102.842		11
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang tersedia dan terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang tersedia dan terpelihara	Unit	1	1.219.138.939	1	1.217.474.942	1	6
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Orang	30	86.265.102	30	86.084.376	30	0,40
	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Dokumen	1	975.765.088	1	945.543.524	1	4

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (%)
2.	PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Meningkatnya Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang		2.357.641.800		2.341.797.944		11
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kegiatan Provinsi		2.357.641.800		2.341.797.944		11
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Dokumen	2	398.397.000	2	396.461.381	2	2
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Laporan	2	1.959.244.800	2	1.945.336.563	2	9
3.	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekraf		1.466.251.160		Rp 1.441.883.723		7
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Pelaku Usaha Kota Kreatif yang memiliki sarana dan prasarana	Jumlah Pelaku Usaha Kota Kreatif yang memiliki sarana dan prasarana	Pelaku Ekraf		Rp 1.145.014.132		Rp 1.134.491.844		5,30
	Perluasan Pasar Produk Kreatif baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Ekspor dan Pasar Domestik	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Laporan	2	Rp 1.073.833.492	2	Rp 1.063.496.274	2	4,97
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	2	Rp 15.510.640	2	Rp 15.490.500	2	0,07
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Laporan	2	Rp 55.670.000	2	Rp 55.505.070	2	0,26

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (%)
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekraf Yang Berdaya Saing	Jumlah Pelaku Ekraf Yang Berdaya Saing	Pelaku Ekraf		Rp 321.237.028		Rp 307.391.879		1,44
	Perlindungan Hasil Kreatifitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas Yang Berupa Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas Yang Berupa Kekayaan Intelektual	Dokumen	1	Rp 117.044.501	1	Rp 114.114.199	1	0,53
	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Produk Hasil Pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif	Orang	75	Rp 204.192.527	75	Rp 193.277.680	75	0,90
4	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi	Orang		Rp 901.000.000		Rp 892.801.801		4,17
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan yang diberikan pelatihan	Jumlah Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan yang diberikan pelatihan	Orang		Rp 641.286.699		Rp 638.473.187		2,98
	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	Jumlah orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	Orang	140	Rp 464.860.584	140	Rp 462.188.313	140	2,16
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitas berdasarkan KSSNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitas berdasarkan KSSNI	Orang	50	Rp 176.426.115	50	Rp 176.284.874	50	0,82
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang		Rp 259.713.301		Rp 254.328.614		1,19
	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan	Orang	50	Rp 89.075.545	50	Rp 87.592.000	50	0,41
	Standarisasi Usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif	Orang yang disertifikasi kompetensi di bidang ekonomi kreatif	Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi di bidang ekonomi kreatif	Orang	20	Rp 170.637.756	20	Rp 166.736.614	20	0,78

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (%)
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		Rp 12.843.509.206		Rp 10.956.208.042		51,19
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Dokumen		Rp 656.881.950		Rp 656.461.267		3,07
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	Rp 656.881.950	7	Rp 656.461.267	7	3,07
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan, Laporan Prognosis, Laporan Simpan, Laporan Aset dan Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan, Laporan Prognosis, Laporan Simpan, Laporan Aset dan Laporan Tahunan	Laporan		Rp 7.891.375.268		Rp 6.043.280.574		28,23
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	59	Rp 7.588.755.268	59	Rp 5.741.016.116	59	26,82
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Pengadministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Rp 135.120.000	12	Rp 135.120.000	12	0,63
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Laporan	1	Rp 167.500.000	1	Rp 167.144.458	1	0,78
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan Asset, KB dan Laporan Tahunan	Tersusunnya Laporan Asset, KB dan Laporan Tahunan	Laporan		Rp 269.808.260		Rp 269.283.848		1,26
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	Rp 269.808.260	2	Rp 269.283.848	2	1,26
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen		Rp 112.855.000		Rp 112.796.800		0,53
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	Rp 112.855.000	50	Rp 112.796.800	50	0,53
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Yang Tepat waktu	Tingkat Layanan Administrasi Yang Tepat waktu	Laporan		Rp 661.048.050		Rp 656.303.515		3,07
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	Rp 14.440.065	4	Rp 14.373.700	4	0,07
	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Peralatan dan Perengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perengkapan kantor	Paket	4	Rp 86.541.900	4	Rp 85.742.700	4	0,40
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4	Rp 57.674.604	4	Rp 57.270.465	4	0,27

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (%)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Laporan	4	Rp 502.391.481	4	Rp 498.916.650	4	2,33
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur	Laporan		Rp 792.236.600		Rp 789.310.000		3,69
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Unit	6	Rp 792.236.600	6	Rp 789.310.000	6	3,69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Yang Tepat Waktu	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Yang Tepat Waktu	Laporan		Rp 2.113.339.877		Rp 2.084.809.151		9,74
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	Rp 281.570.989	12	Rp 260.941.449	12	1,22
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	Rp 1.831.768.888	12	Rp 1.823.867.702	12	8,52
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Rp 345.984.200		Rp 343.962.887		1,61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	Rp 246.464.200	15	Rp 245.315.887	15	1,15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Unit	10	Rp 22.520.000	10	Rp 22.242.000	10	0,10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	2	Rp 77.000.000	2	Rp 76.405.000	2	0,36
			J U M L A H			21.403.749.265,61		19.416.164.402,00		90,71

3.2. Realisasi Anggaran

Dinas Pariwisata di tahun anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dana sebesar **Rp. 21.403.749.266,-** yang kemudian dapat terserap sebesar **Rp. 19.416.163.402,- (90,71%)** diantaranya ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung realisasi anggaran. Dari capaian realisasi anggaran tersebut terdapat deviasi sebesar **9,29 %** yang berasal dari **sisas Gaji sebesar 8,63 %** dan **0,66 % dari sisa-sisa belanja kegiatan**. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.835.347.101.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.783.472.892,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,65 % yang diarahkan untuk 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.357.641.800.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.341.797.944,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,33 % yang diarahkan untuk 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.466.251.160.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.441.883.723,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,33 % yang diarahkan untuk 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 901.000.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp.892.800.801,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,09 %, yang diarahkan untuk 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.843.509.205.- dan realisasi keuangan mencapai Rp.10.956.208.042,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 85,30 % yang diarahkan untuk 8 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Realisasi Anggaran Dinas
Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatkan kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah	1. Meningkatkan Rasio PDRB Pariwisata	0,46 %	0,3185 %	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 3.835.347.101	Rp 3.783.472.892	17,68
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp 297.178.750	Rp 295.398.750	
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 1.256.999.221	Rp 1.238.971.300	
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 2.281.169.130	Rp 2.249.102.842	
					PEMASARAN PARIWISATA	Rp 2.357.641.800	Rp 2.341.797.944	10,94
		2. Meningkatkan Jumlah Perjalanannya Wisatawan Nusantara (orang)	5.500.000	8.246.950	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 2.357.641.800	Rp 2.341.797.944	
					PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp 1.466.251.160	Rp 1.441.883.723	6,74
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp 1.145.014.132	Rp 1.134.491.844	
					Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp 321.237.028	Rp 307.391.879	
					PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 901.000.000	Rp 892.800.801	4,17
2	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1. Capaian realisasi anggaran	98%	90,71 %	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp 641.286.699	Rp 638.473.187	
					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp 259.713.301	Rp 254.327.614	
					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 12.843.509.205	Rp 10.956.208.042	51,19
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 656.861.950	Rp 656.461.267	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.891.375.268	Rp 6.043.280.574	
		2. Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	84	84,60	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 269.808.260	Rp 269.283.848	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 112.855.000	Rp 112.796.800	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 661.048.050	Rp 656.303.515	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 792.236.600	Rp 789.310.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.113.339.877	Rp 2.084.809.151	
		3. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	89,22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 345.984.200	Rp 343.962.887	
					JUMLAH	Rp 21.403.749.266	Rp 19.416.163.402	90,71

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Secara umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Adapun rumusan tujuan sasaran strategis pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yakni :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktifitas sektor unggulan daerah
 - Meningkatnya PDRB sektor unggulan daerah
2. Menurunkan kemiskinan
 - Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan

Tujuan Sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, seluruhnya telah selesai dilaksanakan dan telah berhasil dengan baik dengan capaian kinerja **90,71 %**. Proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pencapaian kinerja, dari 4 program dan 8 kegiatan yang ditetapkan, semua telah mencapai kinerja sasaran yang diharapkan. Dari capaian tersebut, sudah sesuai dengan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian program ini adalah pada tingkat hasil (Outcome). Organisasi telah dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran baik program maupun kegiatan.

B. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang dicapai serta agar lebih efektif pelaksanaan kegiatan yang berhubungan pada pencapaian sasaran dan strategis maka di rekomendasikan beberapa hal antara lain :

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja Aparatur maka diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap sesuai kondisi anggaran yang dimiliki;
2. Perlunya pengembangan destinasi dan pembangunan sarana prasarana pariwisata yang dimiliki kabupaten/kota dengan memperhatikan kemampuan anggaran;
3. Penentuan target indikator pada semua tataran agar ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana final yang telah ditetapkan sehingga tidak menyulitkan dalam pencapaian indikator;
4. Untuk program kegiatan yang dibiayai oleh pusat (APBN/Tugas Pembantuan) agar dilakukan koordinasi baik ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun ditingkat Pusat agar sinkronisasi anggaran program dengan APBD dapat direncanakan sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan bersama.

**Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah**



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199403 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. NOVALINA, MM**

Jabatan : **Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

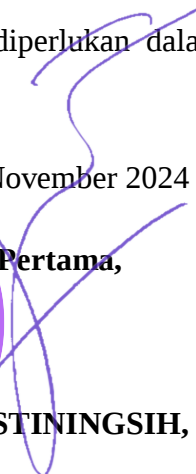
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

Pihak Kedua,

Dra. NOVALINA, MM

Pihak Pertama,

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

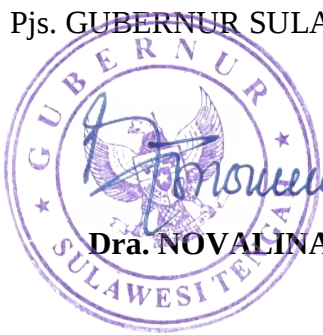
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekraf Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	1. Rasio PDRB Pariwisata 2. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 3. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	0,46 % 5.500.000 Orang Rp 150 Miliar

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 12.843.509.205,61	APBD
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 3.835.347.101,39	APBD
3	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 2.357.641.800,00	APBD
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 1.466.251.160,00	APBD
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 901.000.000,00	APBD

Palu, 11 November 2024

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

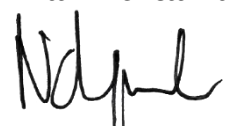
1. Nama : **NENCY AINUN, S.Stp.,M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2024


Pihak Kedua,
Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

Pihak Pertama,

NENCY AINUN, S.Stp.,M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Esselon III

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Program: Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks RB Perangkat Daerah	68,5
	Kegiatan: Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evalausi & pelaporan	Nilai SAKIP Dinas	84
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	7

Program :
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.843.509.205,61

Kegiatan :
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 656.861.950,00

Sub Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 656.861.950,00

Palu, Oktober 2024

Mengetahui/menyetujui,

Yang Menyusun,

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

NENCY AINUN, S.Stp., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19810501 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HASNA, S.Sos.,M.Ap**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

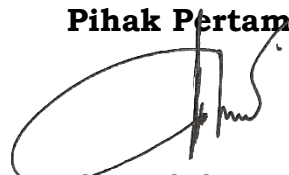
2. Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2024


Pihak Kedua,
Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

Pihak Pertama,

HASNA, S.Sos.,M.Ap

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Esselon III

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Program: Meningkatnya Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	4 Hari
A.	Kegiatan: Meningkatnya Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi	Presentase Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Terstandar Pengelolaannya	1
	Sub Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Pulo Dua Kab. Banggai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	1
B.	Kegiatan: Meningkatnya Jumlah Daya Tarik Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Presentase Daya Tarik Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi Yang Terstandar Pengelolaannya	5
	Sub Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Penyusunan Master Plan Kepulauan Togean	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1
	Sub Kegiatan: Tersedianya Fasilitas Pergola di KSPP Megalith	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4
C.	Kegiatan: Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata provinsi	Presentase destinasi pariwisata propinsi yang terstandar pengelolaannya	65
	Sub Kegiatan: Tersedia dan Terpeliharanya Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi di Area FDP Tentena Kab. Poso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	5

	Sub Kegiatan: Terselarasnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kota Palu	Jumlah Pengelola Destinasi Pariwisata	30
	Sub Kegiatan: Terselenggaranya FGD Penetapan Warisan Geologi Geopark Danau Poso	Jumlah Peserta FGD Penetapan Warisan Geologi Geopark Danau Poso	30

Program:	Anggaran:
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 2.611.633.676
Kegiatan: Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp 297.178.750,25
Sub Kegiatan:	
1. Perencanaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Rp 297.178.750,25
Kegiatan: Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 1.256.999.221,00
Sub Kegiatan:	
1. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 321.433.299,00
2. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 935.565.922,00
Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 2.281.169.130,14
Sub Kegiatan:	
1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 1.219.138.939,09
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 86.265.102,25
3. Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Rp 975.765.088,80

Palu, Oktober 2024

Yang Menyusun,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA PROV. SULTENG**

HASNA, S.Sos, M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19711121 200012 2 001

Mengetahui/menyetujui,

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HERNI HERAWATI ABD.GANI, S.ST.Par**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran**
Dinas Pariwisata Prov. Sulteng
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

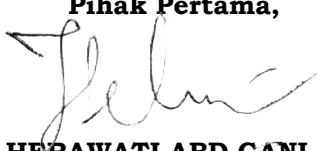
2. Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

Palu, Oktober 2024

Pihak Pertama,

HERNI HERAWATI ABD.GANI, S.ST.Par

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Esselon III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Program Meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata dalam negeri	Presentase pengunjung kegiatan promosi pariwisata dalam negeri	5.509.000
A.	Kegiatan Meningkatnya penyebaran informasi pariwisata berbasis media cetak	Jenis media promosi yang berbasis media cetak	
	Sub Kegiatan: Tersusunnya buku data kunjungan wisatawan 13 kabupaten/kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah buku data kunjungan wisatawan 13 kabupaten/kota yang tersusun Target 200 Buku	2
B.	Kegiatan: Meningkatnya Promosi pariwisata di event dalam dan luar negeri	Presentase event promosi dalam dan luar negeri yang diikuti	
	Sub Kegiatan: Terkoneksinya paket wisata Sulteng kepada pelaku perjalanan wisata peserta ATM Dubai	Jumlah pelaku perjalanan wisata yang terkoneksi	20
	Sub Kegiatan: Terpromosinya Paket Wisata Kabupaten Tojo Una-Una dan Donggala di Event Follow Up Bali Beyond Travel Fair	Jumlah Paket wisata yang terpromosi	2
	Sub Kegiatan: Terpromosinya Potensi Pariwisata dan Ekraf pada event International Tourism Invesment Forum (ITIF)	Jumlah Event yang diikuti	2

	Sub Kegiatan: Terfasilitasinya workshop bagi pelaku Pariwisata 13 Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Pariwisata yang dilatih mengemas event	50
	Sub Kegiatan: Terfasilitasinya dukungan event di Kabupaten Poso dan Banggai	Jumlah event yang didukung pelaksanaannya	2
	Sub Kegiatan: Terpublikasinya video promosi pariwisata Sulawesi Tengah di Area Bandara Soekarno Hatta Jakarta	Jumlah timeline video promosi pariwisata yang ditayangkan	405

Program :
Pemasaran Pariwisata

Anggaran:
Rp. 2.357.641.800,00

Kegiatan:
Pemasaran Pariwisata Dalam danLuar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Rp 2.357.641.800,00

- Sub Kegiatan:**
1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik
Dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Rp 398.397.000,00
2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam
dan Luar Negeri

Rp 1.959.244.800,00

Mengetahui/menyetujui,

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

Palu, Oktober 2024

Yang Menyusun,

**Plt. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA PROV. SULTENG**



HERNI HERAWATI ABD.GANI, S.ST.Par
Pembina
NIP. 19660705 198702 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. A. SRI ILMYANI ARIF**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif,
Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

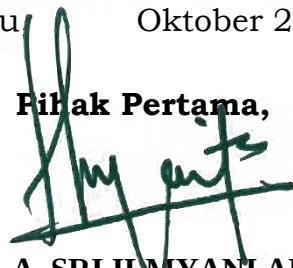
2. Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

Palu, Oktober 2024


Pihak Pertama,
Dra. A. SRI ILMYANI ARIF

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN DAN

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Esselon III

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Program Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Presentase Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	150 Miliar
A.	Kegiatan Meningkatnya Pelaku Usaha Kreatif Yang Memiliki Sarana dan Prasarana	Presentase Pelaku Usaha Kreatif Yang Memiliki Sarana dan Prasarana	
	Sub Kegiatan: Tersusunnya Data Pelaku Usaha Ekraf Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Ekraf Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong yang Tersusun	2
	Sub Kegiatan: Tersusunnya Data Pelaku Usaha Ekraf Kabupaten Poso, Banggai dan Toli-Toli Usaha Pemula	Jumlah Data Pelaku Usaha Ekraf Kabupaten Poso, Banggai dan Toli-Toli Yang Tersusun	3
	Sub Kegiatan: Tersalurkannya Bantuan Sanggar Seni di Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala	Jumlah Sanggar yang disalurkan	8
B.	Kegiatan Meningkatnya Pelaku Ekraf Yang Berdaya Saing	Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif	105
	Sub Kegiatan: Terselenggaranya Kegiatan Festival Kuliner di Kabupaten Tojo Una Una	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Festival yang diselenggarakan	30
	Sub Kegiatan: Terfasilitasinya Pelaku Usaha Ekraf untuk mengikuti Workshop dan pendaftaran HAKI di Kabupaten Poso	Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang difasilitasi mengikuti workshop dan pendaftaran HAKI	45

	Sub Kegiatan: Terselenggaranya Kegiatan Lomba Kuliner Pembuatan Kue dari Gula Aren di Kabupaten Toli-Toli	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Festival yang diselenggarakan	30
--	---	--	----

Program :
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Anggaran:
Rp. 1.466.251.160,00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
Sub Kegiatan:

Rp 1.145.014.132,00

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif

Rp15.510.640
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula

Rp55.670.000,00
3. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik

Rp1.073.833.492,00

Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Sub Kegiatan:

Rp 321.237.028,00

1. Perlindungan Hasil Kreativitas

Rp117.044.501,00
2. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Rp204.192.527,00

Mengetahui/menyetujui,

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

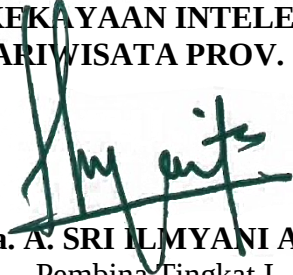


Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

Palu, Oktober 2024

Yang Menyusun,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN
DAN PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DINAS PARIWISATA PROV. SULTENG**



Dra. A. SRI ILMYANI ARIF
Pembina Tingkat I
NIP. 19670516 198703 2 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **WIDYAWATI, SS., M.Sc**

Jabatan : **Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Prov. Sulteng**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**

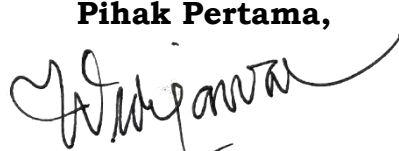
Selaku atasan pihak ke satu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

Palu, Oktober 2024

Pihak Pertama,

WIDYAWATI, SS., M.Sc

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BIDANG SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Program Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Terdidik dan Terlatih	215
A.	Kegiatan Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan Yang Diberikan Pelatihan	Presentase Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan Yang Diberikan Pelatihan	140
	Sub Kegiatan: Termbimbingnya Aparatur Kepariwisataan	Jumlah Aparatur yang Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	45
	Sub Kegiatan: Terlatihnya Pemandu Wisata	Jumlah Pemandu Wisata yang terlatih	45
	Sub Kegiatan: Terlatihnya Peningkatan Kapasitas Pengelola Homestay di Kab.Poso	Jumlah Pengelola Homestay di Kabupaten Poso yang Terlatih	50
B.	Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Pelaku Ekraf	Presentase Pelaku Ekraf Yang Mandiri	75
	Sub Kegiatan: Terlatihnya Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekraf Bidang Fotografi di Kota Palu	Jumlah Pelaku Ekraf Bidang Fotografi di Kota Palu yang dilatih	50
	Sub Kegiatan: Tersertifikasinya Kompetensi Keahlian Barista di Kota Palu	Jumlah Barista yang di sertifikasi keahliannya	25

Program :
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Anggaran:
Rp 901.000.000,00

**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**

- Sub Kegiatan:
1. Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi
Pemerintah Daerah

Rp 464.860.584,00
2. Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI

Rp 176.426.115,00

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- Sub Kegiatan:
1. Pelatihan, Bimbingan Tehnis, dan Pendampingan Ekraf

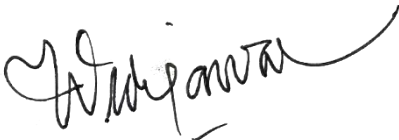
Rp 89.075.545
2. Standarnisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekraf

Rp 170.637.756,00

Palu, Oktober 2024

Yang Menyusun,

**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**



WIDYAWATI, SS., M.Sc
Penata Tingkat I
NIP. 19710822 200502 2 002

Mengetahui/menyetujui,

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dra. TEAH ACUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

PERJANJIAN KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **HUNAENI, S.Sos**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **NENCY AINUN, S.Stp.,M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak ke satu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



NENCY AINUN, S.Stp.,M.Si

Palu, Oktober 2024

Pihak Pertama,

HUNAENI, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Kegiatan Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesional Asn Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan: Tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	59
B.	Kegiatan Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan: Tersusunnya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4
C.	Kegiatan Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan: Tersedianya Cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang penyediaan Cetakan dan penggandaan yang disediakan	4
D.	Kegiatan Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4
E.	Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	

	Sub Kegiatan: Tersusunnya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4
--	---	---	---

Kegiatan Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Rp 112.855.000,00

Kegiatan Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Rp 502.391.481,00

Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Barang Cetakn dan Pengadaan
- Rp 57.674.604,31

Kegiatan Terwujudnya Penerapan SPBE Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- Rp 281.570.989,00

Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Rp 1.831.768.888,00

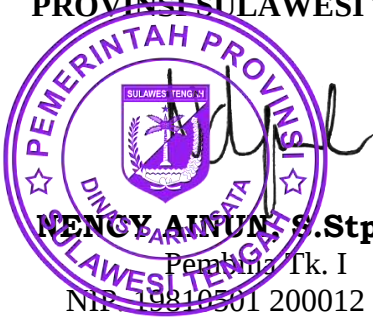
Palu, Oktober 2024

Mengetahui/menyetujui,

Yang Menyusun,

**SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PARIWISATA PROV. SULTENG**



NENCY AINUN, S.Stp.,M.Si
Pemula Tk. I
NIP. 19810501 200012 2 001



HUNAENI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19670703 198903 2 017

PERJANJIAN KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **RANI ADELIA, SE, MM**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **NENCY AINUN, S.Stp.,M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak ke satu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2024



Pihak Kedua,

NENCY AINUN, S.Stp.,M.Si

Pihak Pertama,

RANI ADELIA, SE, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Kegiatan Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	TLHP BPK Dan APIP Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan: Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63
	Sub Kegiatan: Tersusunnya Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksnaaan Tugas ASN	12
	Sub Kegiatan: Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1
B.	Kegiatan Barang Milik Daerah Memadai	Presentase laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	
	Sub Kegiatan: Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2
	Sub Kegiatan: Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15
	Sub Kegiatan: Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	37
	Sub Kegiatan: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Rp 7.588.755.268,30
2. Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Rp 135.120.000,00

- | | |
|---|-------------------|
| 3. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan
akhir Tahun SKPD | Rp 167.500.000,00 |
|---|-------------------|

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD | Rp 269.808.260,00 |
|--|-------------------|

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- | | |
|--|---------------|
| 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor | Rp 6.932.647 |
| 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Rp 73.597.500 |

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 792.236.600,00 |
|--|-------------------|

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 246.464.200,00 |
| 2. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Rp 22.520.000,00 |
| 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi saran dan prasarana Gedung Kantor
Atau bangunan Lainnya | Rp 77.000.000,00 |

Palu, Oktober 2024

Mengetahui/menyetujui,

Yang Menyusun,

**SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET
DINAS PARIWISATA PROV. SULTENG**



NENCY AINUN, S.Stp.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19810501 200012 2 001

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rani Adelia", is written over the official stamp of the Sub-Section of Finance and Assets of the Provincial Office of Tourism and Culture of Central Sulawesi.

RANI ADELIA, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19680628 200701 2 013